

**INOVASI PERCEPATAN PENCAPAIAN KEPEMILIKAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN (PEKAD 3 IN 1 PLUS) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH**

Al Yedi Asadullah Sya'bandi
NPP 32.0005

Asdaf Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: aalyedi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Ella Lesmanawaty Wargadinata, M.Si, MA.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The problem in this thesis is the suboptimal dissemination of information and public acceptance of the PEKAD 3 IN 1 PLUS innovation at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Lhokseumawe City, Aceh Province. **Purpose:** This research aims to analyze the implementation of the PEKAD 3 IN 1 PLUS innovation at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Lhokseumawe City, Aceh Province. **Method:** The method used in this research is a descriptive qualitative approach, employing in-depth interviews, field observations, and documentation techniques. **Results/Findings:** Based on research conducted on the PEKAD 3 IN 1 PLUS innovation at the Population and Civil Registration Office of Lhokseumawe City, the implementation of this public service innovation shows promising results in increasing the efficiency of the population document processing. Specifically, this program allows the public to obtain three important documents—birth certificates, Family Cards, and Child Identity Cards—in a single integrated service. This innovation has reduced bureaucracy and provided faster services that are more easily accessible to the public. Data from 2023 shows that the service successfully achieved its target in document processing, with a significant increase in user satisfaction due to the convenience offered by the integrated service system. However, challenges such as technical issues with the information system and incomplete documents still persist, affecting the full potential of this program. **Conclusion:** In conclusion, PEKAD 3 IN 1 PLUS is an effective and adaptive service innovation, but it still requires improvements in internal digitalization systems, increased public administrative literacy, and strengthening technical regulations between agencies to support the sustainability and optimization of the innovation.

Keywords: adoption barriers, Disdukcapil, innovation diffusion, Public service innovation, PEKAD 3 IN 1 PLUS.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan dalam skripsi ini adalah belum optimalnya penyebaran informasi dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Disdukcapil Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Disdukcapil Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, penerapan inovasi layanan publik ini menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan efisiensi proses pengurusan dokumen kependudukan. Secara spesifik, program ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh tiga dokumen penting—akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak—dalam satu layanan terintegrasi. Inovasi ini telah mengurangi proses birokrasi dan memberikan layanan yang lebih cepat serta mudah diakses oleh masyarakat. Data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa layanan ini berhasil mencapai target dalam pengolahan dokumen, dengan peningkatan signifikan dalam kepuasan pengguna karena kemudahan yang ditawarkan oleh sistem layanan terintegrasi. Namun, tantangan seperti masalah teknis pada sistem informasi dan ketidaklengkapan dokumen masih ada, yang memengaruhi potensi penuh dari program ini. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, PEKAD 3 IN 1 PLUS merupakan inovasi pelayanan yang efektif dan adaptif, namun masih memerlukan perbaikan sistem digitalisasi internal, peningkatan literasi administrasi masyarakat, serta penguatan regulasi teknis antarinstansi untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi inovasi tersebut. **Kata kunci:** Disdukcapil, Difusi inovasi, hambatan adopsi, inovasi pelayanan publik, PEKAD 3 IN 1 PLUS

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam perspektif pemerintah terkait pelayanan publik, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kurtanto *et al.*, 2019). Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah pengembangan e-government yang dimulai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003, yang mendorong penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan (Septiani, 2020). Pemerintah terus mendorong inovasi di sektor pelayanan publik sebagai bagian dari upaya penerapan *e-government*, yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Madjid, 2021). Inovasi pelayanan publik merupakan langkah penting dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Inovasi ini bisa berupa ide baru, perubahan cara bertindak, atau pengembangan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Afriyani *et al.*, 2023). Salah satu bentuk inovasi yang berkembang adalah inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit dan meningkatkan efisiensi pelayanan (Verona *et al.*, 2023).

Wargadinata (2021) menekankan pentingnya peran pemangku kepentingan dalam implementasi program e-government di daerah, khususnya dalam konteks pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Di Kota Lhokseumawe, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah menerapkan inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS. Program

ini memungkinkan masyarakat untuk mengurus tiga dokumen kependudukan sekaligus akte kelahiran, kartu keluarga (KK), dan kartu identitas anak (KIA) dalam satu kali proses layanan. Layanan ini dikelola melalui kerja sama dengan rumah sakit, di mana masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi kantor Disdukcapil secara langsung, karena dokumen yang diperlukan akan diproses oleh petugas rumah sakit dan diserahkan langsung kepada keluarga pasien (Bappeda Kota Lhokseumawe, 2024). Namun, meskipun inovasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, masih ada beberapa tantangan dalam proses implementasinya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah masalah teknis terkait stabilitas jaringan sistem informasi dan ketidaklengkapan dokumen dari masyarakat yang menghambat kelancaran proses pelayanan (Setyowati *et al*, 2020). Disdukcapil Kota Lhokseumawe telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan ini, seperti meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat sosialisasi melalui media sosial serta pelaksanaan program jemput bola ke daerah-daerah (gampong-gampong) untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Kota Lhokseumawe, mengidentifikasi hambatan dalam penyebaran dan adopsi inovasi, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan wawasan tentang implementasi inovasi serupa di daerah lain (Karman *et al*. 2021; Nurdiansyah *et al*, 2024).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan penelitian (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017), jumlah penduduk cenderung tetap disebabkan tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Namun untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, masyarakat kini semakin menuntut kemudahan akses dan kecepatan layanan, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat penyebaran informasi serta adopsi inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di kalangan masyarakat Kota Lhokseumawe. Meskipun Disdukcapil telah mengimplementasikan inovasi tersebut dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan, masih terdapat tantangan dalam hal penyebaran informasi yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan inovasi tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada kendala dalam aspek sosial, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi, sehingga memperlambat tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai hambatan-hambatan tersebut serta upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Lhokseumawe dalam mengatasi kesenjangan ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Didalam Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas difusi inovasi oleh Rogers (2003) dalam pelayanan publik, termasuk inovasi dalam sektor administrasi kependudukan. Mardiyanti (2019) dalam penelitiannya mengenai inovasi "SAMSAT *On The Spot*" di Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa inovasi ini efektif dalam mengatasi kendala pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah yang luas, meskipun

sosialisasinya masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini lebih fokus pada pelayanan pajak kendaraan bermotor, sementara penelitian PEKAD 3 IN 1 PLUS mengkaji integrasi layanan administrasi kependudukan yang melibatkan beberapa dokumen dalam satu prosedur pelayanan Prasetyowati dan Kismartini (2023) melakukan penelitian tentang inovasi "PAKLAY Komplit" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menemukan bahwa difusi inovasi dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti budaya organisasi dan individu, tetapi juga menghadapi hambatan teknis dalam penggunaan teknologi. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus pada pelayanan administrasi kependudukan, penelitian PEKAD 3 IN 1 PLUS lebih menekankan pada tantangan lokal di Kota Lhokseumawe yang berbeda dalam hal inovasi dan karakteristik pelayanan. Dewi dan Prakoso (2025) dalam penelitiannya tentang aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa aplikasi ini mempercepat layanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi digital, namun masih ada tantangan dalam penerimaan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Sementara itu, PEKAD 3 IN 1 PLUS lebih fokus pada integrasi layanan administrasi kependudukan dalam satu prosedur tanpa mengandalkan sepenuhnya pada aplikasi digital Isnawati (2017) dalam penelitiannya mengenai program keluarga berencana di Desa Lompio, Kabupaten Donggala, menunjukkan bahwa difusi program "Dua Anak Lebih Baik" berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui komunikasi interpersonal dan dukungan tokoh masyarakat. Walaupun penelitian ini lebih fokus pada program keluarga berencana, metode difusi yang digunakan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana komunikasi efektif dapat mempengaruhi adopsi inovasi di tingkat masyarakat Walker (2006) menganalisis jenis inovasi dan proses difusinya dalam pemerintahan lokal, menekankan pentingnya memahami bagaimana inovasi diperkenalkan dan diterima dalam konteks organisasi publik. Teori ini digunakan dalam penelitian PEKAD 3 IN 1 PLUS untuk menganalisis bagaimana inovasi ini disebarluaskan dan diadopsi oleh masyarakat serta pegawai pemerintah di Kota Lhokseumawe, memberikan perspektif lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi adopsi inovasi dalam pelayanan publik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kebaruan ilmiah dalam penerapan teori difusi inovasi oleh Rogers (2003) pada konteks pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah, khususnya dalam studi implementasi inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lhokseumawe. Sebelumnya, kajian difusi inovasi umumnya lebih banyak diterapkan pada sektor teknologi, bisnis, dan kesehatan, serta masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana inovasi administrasi publik, khususnya di bidang kependudukan, diadopsi secara efektif oleh pemerintah daerah. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor penghambat penyebaran inovasi serta strategi konkret yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan adopsi masyarakat terhadap layanan digital. Dengan pendekatan studi kasus lokal, penelitian ini juga menawarkan pemahaman kontekstual mengenai dinamika penerimaan inovasi di tingkat masyarakat akar rumput, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam literatur difusi inovasi di sektor publik. Kontribusi baru yang dihasilkan adalah adanya pemetaan spesifik hambatan dan solusi yang dihadapi daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik berbasis digital, yang dapat dijadikan referensi atau

model adaptif bagi daerah lain dengan karakteristik serupa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Disdukcapil Kota Lhokseumawe serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat proses penyebaran dan adopsi inovasi tersebut di kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Lhokseumawe untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, dengan tujuan agar penyebaran informasi mengenai inovasi ini dapat lebih efektif dan tingkat adopsinya dapat meningkat. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang dinamika implementasi PEKAD 3 IN 1 PLUS serta solusi yang diambil oleh Disdukcapil dalam rangka mempercepat pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Lhokseumawe.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang penerapan inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Disdukcapil Kota Lhokseumawe. Menurut (Simangunsong, 2017) Penelitian kualitatif memiliki karakter partisipatif dengan desain yang dapat disesuaikan, memungkinkan peneliti memodifikasi rencana awal untuk mengakomodasi fenomena nyata yang ditemukan di lokasi penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif individu terkait inovasi yang diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam adopsinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi memberikan data mendalam dari konteks sosial yang sedang berlangsung. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap, seperti notulensi rapat, surat tugas, dan laporan kegiatan (Patton, 2002). Wawancara mendalam dipilih karena memberikan ruang bagi informan untuk mengungkapkan pandangan, pengalaman, dan masalah secara rinci. Observasi digunakan untuk mengamati langsung dinamika yang terjadi selama implementasi inovasi, sedangkan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi informasi terkait data administrasi dan kebijakan yang ada. Informan yang dipilih terdiri dari empat orang petugas Disdukcapil Kota Lhokseumawe, satu petugas rumah sakit yang berperan dalam pelayanan KIA/KB di RSIA "ABBY" sehingga dijadikan informan kunci pada penelitian ini. Pemilihan informan ini didasarkan pada pengalaman langsung mereka dalam menerapkan inovasi tersebut, baik dari sisi operasional di Disdukcapil maupun dari perspektif pengguna layanan rumah sakit. Dua informan masyarakat yang telah menggunakan layanan PEKAD 3 IN 1 PLUS juga dipilih untuk mendapatkan pandangan langsung dari pengguna inovasi. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2024 hingga Juni 2025 di Kota Lhokseumawe, dengan lokasi utama di Disdukcapil dan beberapa rumah sakit yang berkolaborasi dalam program ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Disdukcapil Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe memiliki sejumlah rumah sakit yang berperan penting dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan daerah. Berdasarkan data distribusi rumah sakit

periode 2019–2021, tercatat bahwa Kecamatan Blang Mangat dan Muara Dua masing-masing memiliki satu rumah sakit yang stabil jumlahnya. Sebaliknya, jumlah rumah sakit di Kecamatan Muara Satu mengalami penurunan dari tiga menjadi satu rumah sakit, sementara Banda Sakti mengalami peningkatan dari lima menjadi enam rumah sakit. Secara keseluruhan, total rumah sakit di Kota Lhokseumawe sempat mengalami fluktuasi, yakni dari 10 unit pada tahun 2019, menurun menjadi 8 unit pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 9 unit pada tahun 2021. Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lhokseumawe telah menjalin kerja sama terstruktur dengan empat rumah sakit di wilayahnya, yakni RSIA ABBY, RS Arun, RS MMC, dan RSUD Az-Zuhra. Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) yang diikuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan pelaksanaan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid PIAK, Lijayani, S.Sos. pada 13 Januari 2025, dijelaskan bahwa teknis pelaksanaannya adalah petugas rumah sakit, seperti perawat atau bidan, yang mengurus dokumen kependudukan bagi ibu melahirkan di rumah sakit tersebut. Keluarga pasien hanya perlu melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkannya kepada petugas rumah sakit yang ditunjuk.

Setiap rumah sakit yang terlibat dalam kerja sama ini memiliki petugas penghubung khusus yang berkoordinasi langsung dengan pegawai Disdukcapil untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen yang dibutuhkan. Setelah berkas diterima dari rumah sakit, dokumen akan diverifikasi secara manual oleh petugas di kantor Disdukcapil. Verifikasi ini mencakup pemeriksaan data secara menyeluruh guna menghindari kesalahan sebelum dokumen dicetak. Selanjutnya, dokumen yang telah selesai diproses akan diantar kembali oleh petugas rumah sakit kepada keluarga pasien, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil, yang selaras dengan tujuan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Namun, proses verifikasi manual ini menyimpan potensi keterlambatan, terutama jika volume permintaan tinggi dalam satu waktu. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga efisiensi pelayanan. Meskipun demikian, Disdukcapil Kota Lhokseumawe telah mengantisipasi potensi kendala ini melalui penerapan sistem verifikasi bertahap dengan hierarki tanda tangan serta melibatkan seluruh pegawai yang kompeten dalam proses verifikasi dokumen. Langkah ini dilakukan guna meminimalkan kesalahan dan menghindari penumpukan dokumen, sehingga pelayanan tetap berjalan lancar. Keberhasilan implementasi inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers (2003), yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi ditentukan oleh lima karakteristik utama: *relative advantage* (keuntungan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemampuan untuk diuji coba), dan *observability* (kemudahan untuk diamati). Keberhasilan administrasi kependudukan sangat bergantung pada kemampuan untuk terus berinovasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif (Wance *et al.*, 2025). Dalam konteks ini, inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS memiliki potensi tinggi untuk diadopsi secara luas oleh masyarakat apabila mampu memenuhi kelima indikator tersebut, baik dari segi kemudahan akses, kecepatan pelayanan, maupun efektivitas koordinasi antara lembaga yang terlibat. Adapun analisis dari kelima indikator karakteristik inovasi menurut teori difusi inovasi Rogers (2003) adalah sebagai berikut:

3.1.1 Keuntungan Relatif

Inovasi ini memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat, karena memungkinkan pengurusan tiga dokumen kependudukan sekaligus (Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak). Dengan adanya integrasi layanan ini, masyarakat tidak perlu mengurus dokumen secara terpisah, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Penerbitan akta kelahiran di Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi selama empat tahun terakhir, dengan penurunan pada tahun 2024 yang menandakan adanya tantangan dalam keberlanjutan implementasi inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh transisi kepemimpinan daerah pasca pemilihan kepala daerah, gangguan teknis seperti masalah jaringan SIAK, serta fokus pemerintah pada program lain. Meskipun demikian, wawancara dengan masyarakat dan pegawai menunjukkan dampak positif dari inovasi ini. Salah satu informan, Ibu Annisa, mengungkapkan bahwa ia hanya perlu menyerahkan persyaratan administrasi ke perawat rumah sakit setelah melahirkan, dan dalam waktu tiga hari, akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), serta Kartu Identitas Anak (KIA) sudah diterima tanpa perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil. Hal ini mencerminkan efisiensi dan kemudahan yang dihadirkan oleh inovasi ini. Di sisi lain, Kabid Dafduk, Muliya Fika, menjelaskan bahwa integrasi layanan melalui kerjasama dengan rumah sakit dan bidan mengurangi antrean di kantor Disdukcapil dan mempercepat proses administrasi, asalkan persyaratan yang diajukan lengkap. Ini menunjukkan bahwa inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS memberikan keuntungan relatif, seperti penghematan waktu dan kemudahan akses bagi masyarakat, serta efisiensi dalam pengelolaan beban kerja pegawai, sesuai dengan prinsip difusi inovasi Rogers. Inovasi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Lhokseumawe dan berpotensi memperkuat adopsi lebih luas di masa depan.

3.1.2 Kompatibilitas

Inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Kota Lhokseumawe sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan efisien, terutama dalam momen penting seperti kelahiran anak. Dalam wawancara dengan Kasi SIAK, Bapak Fachrurrazi, beliau menjelaskan bahwa meskipun masyarakat tidak mengetahui nama inovasi ini, mereka merasakan langsung manfaat dari sistem ini. Masyarakat cukup melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh petugas rumah sakit, dan dokumen penting seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) baru, serta Kartu Identitas Anak (KIA) dapat diterbitkan secara bersamaan tanpa perlu bolak-balik ke kantor Disdukcapil. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih fokus pada hasil akhir yang cepat dan mudah, tanpa terlalu mempermasalahkan terminologi atau label dari inovasi tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan teori kompatibilitas dalam difusi inovasi menurut Rogers (2003), di mana tingkat kesesuaian suatu inovasi dengan nilai, kebutuhan, dan pengalaman sebelumnya sangat mempengaruhi penerimaannya. Inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS dianggap kompatibel dengan ekspektasi masyarakat yang menginginkan layanan administrasi kependudukan yang lebih efisien dan tidak rumit. Masyarakat cenderung menerima inovasi ini karena mampu menyederhanakan proses yang sebelumnya dianggap kompleks, sehingga meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan publik.

Selain itu, dari sisi pegawai, inovasi ini juga sangat mendukung efisiensi kerja internal. Sebelum adanya sistem integrasi, pegawai Disdukcapil harus memproses dokumen satu per satu, bahkan untuk pemohon yang sama. Dengan adanya PEKAD 3 IN 1 PLUS, proses pelayanan dilakukan secara bersamaan dalam satu sistem yang terintegrasi,

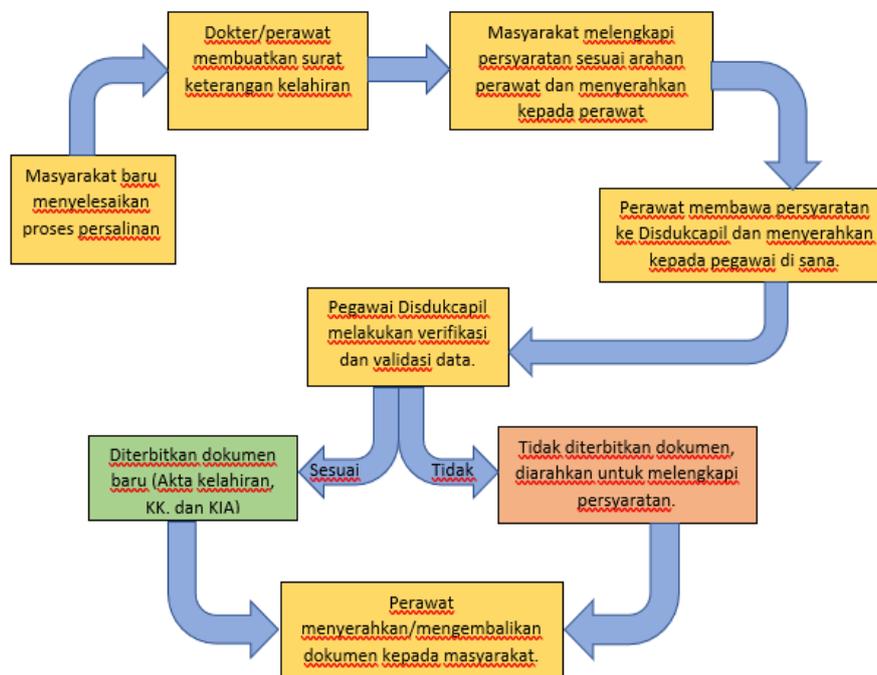
mengurangi duplikasi kerja, dan mempercepat penyelesaian administrasi. Pegawai yang sebelumnya terbebani dengan antrean panjang dan beban administratif kini dapat lebih fokus pada validasi data dan penyusunan dokumen akhir. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi ini tidak hanya kompatibel dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dengan pengalaman kerja pegawai yang lebih memilih sistem yang lebih efisien dan terorganisir. Secara keseluruhan, inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS memiliki kompatibilitas yang tinggi baik dengan nilai dan kebutuhan masyarakat maupun dengan pola kerja pegawai. Inovasi ini memperkuat prinsip pelayanan yang cepat, sederhana, dan efisien, yang sangat dihargai oleh kedua belah pihak. Dengan tingkat kompatibilitas yang tinggi, inovasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Lhokseumawe dan pegawai Disdukcapil, serta memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

3.1.3 Kompleksitas

Untuk Dari sisi teknis, inovasi ini memiliki tingkat kompleksitas yang sedang. Menurut teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003), kompleksitas merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dianggap sulit dipahami dan digunakan. Semakin tinggi kompleksitas suatu inovasi, maka semakin rendah kemungkinan inovasi tersebut diadopsi secara luas. Namun demikian, pada konteks inovasi pelayanan dokumen kependudukan ini, kompleksitas berhasil ditekan melalui struktur koordinasi yang tertuang dalam SOP pelayanan, yang disepakati bersama dalam nota kesepahaman antara Disdukcapil dan fasilitas kesehatan mitra, seperti rumah sakit.



Gambar 1
Diagram Alur Kerja PEKAD 3 IN 1 PLUS



Sumber: Diolah penulis dari Mou Disdukcapil dan Rumah Sakit (2025)

Inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Disdukcapil Kota Lhokseumawe mempermudah proses administrasi kelahiran dengan melibatkan petugas rumah sakit sebagai perantara. Setelah kelahiran, tenaga medis mengeluarkan surat keterangan kelahiran, dan masyarakat melengkapi persyaratan yang kemudian diserahkan kepada perawat untuk diteruskan ke Disdukcapil. Jika dokumen lengkap, tiga dokumen—Akta Kelahiran, KK baru, dan KIA—diterbitkan sekaligus. Jika tidak lengkap, masyarakat diminta melengkapinya. Proses ini dijelaskan secara sistematis dalam SOP, yang memetakan alur kerja mulai dari pengumpulan persyaratan hingga pengantaran dokumen kepada keluarga. SOP ini mengurangi persepsi kerumitan dengan pembagian tugas yang jelas, pengaturan waktu pelayanan, dan mekanisme komunikasi antarinstansi, seperti penunjukan petugas penghubung di rumah sakit. Meskipun inovasi ini membutuhkan adaptasi teknis bagi pegawai, SOP yang terstruktur memudahkan transisi dari sistem manual ke layanan terintegrasi. Bagi masyarakat, inovasi ini tidak terasa kompleks karena mayoritas proses diurus oleh petugas rumah sakit, memungkinkan mereka hanya menyerahkan dokumen dan menunggu hasilnya. Dari sudut pandang teori Rogers, kompleksitas inovasi ini berhasil diminimalkan melalui dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi yang terorganisir, sehingga mendukung difusi inovasi yang stabil dan berkelanjutan.

3.1.4 Triabilitas

Program PEKAD 3 IN 1 PLUS dimulai dengan uji coba di RSIA ABBY sebelum diperluas ke tiga rumah sakit lain. Proses uji coba ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis dan administratif yang kemudian diperbaiki dengan menyusun

SOP bersama. Dalam teori difusi inovasi Rogers (2003), *triability* merujuk pada kemampuan inovasi untuk dicoba dalam skala kecil guna mengurangi risiko kegagalan sebelum diadopsi secara luas. Penerapan prinsip ini dalam PEKAD 3 IN 1 PLUS memberikan hasil positif, karena uji coba memungkinkan deteksi dini masalah seperti pengumpulan dokumen, komunikasi antar petugas, dan pengaturan jadwal verifikasi. Melalui tahap uji coba ini, tim dari Disdukcapil dan rumah sakit dapat mengidentifikasi solusi secara kolaboratif, yang akhirnya dipformalkan dalam SOP yang memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. SOP ini menciptakan alur kerja yang efisien dan akuntabel, dan hasil perbaikan tersebut dijadikan panduan saat inovasi diperluas ke rumah sakit lain. Keberhasilan tahap uji coba ini juga berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat. Pengalaman sukses di RSIA ABBY meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan baru ini, dan masyarakat mulai merasa terbantu dengan pelayanan yang cepat dan mudah tanpa harus ke Disdukcapil, seperti yang disampaikan oleh perawat RS MMC, Maisan, dalam wawancara pada 18 Januari 2025. Triabilitas yang tinggi dalam inovasi ini memungkinkan evaluasi berulang dan penyesuaian lokal, yang sangat penting dalam konteks pelayanan publik. Dengan uji coba yang terkendali, proses implementasi menjadi lebih terstruktur dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, strategi penerapan PEKAD 3 IN 1 PLUS dengan pendekatan bertahap mendukung keberhasilan difusi inovasi, mempercepat penerimaan oleh masyarakat dan pegawai, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Lhokseumawe.

3.1.5 Observabilitas

Dampak inovasi ini terlihat jelas dari peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yang tercatat dalam data agregat semesteran tahun 2023–2024 (Dokumentasi, 2025). Masyarakat dapat dengan mudah mengamati hasil nyata dari inovasi ini, yaitu dokumen kependudukan yang diterima saat mereka keluar dari rumah sakit. Pegawai Disdukcapil juga dapat mengamati peningkatan akurasi dan kecepatan pelayanan melalui data internal yang lebih tertata. Disdukcapil Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa jumlah kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0–4 tahun yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lhokseumawe selama tiga periode semester, yaitu Semester II Tahun 2023 tercatat sebanyak 20.234 anak usia 0–4 tahun telah memiliki akta kelahiran, Semester I Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 17.861 anak, Semester II Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 19.591 anak.

Penurunan signifikan pada Semester I Tahun 2024, meskipun inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS telah diterapkan, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas inovasi tersebut dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Beberapa faktor diduga memengaruhi penurunan ini. Pertama, gangguan pelayanan Disdukcapil akibat ketidakstabilan arus listrik dan jaringan internet berdampak langsung pada kelancaran penerbitan dokumen (Syahputra, 2023). Kedua, transisi kepemimpinan daerah pada tahun 2024 turut memengaruhi kelangsungan program yang sedang berjalan (Masriadi & Arief, 2024; Mulyadi, 2024). Ketiga, fokus pemerintah pada program lain seperti pencegahan narkoba dan pengelolaan sampah juga dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari inovasi kependudukan (Jamil, 2024; Surry, 2024).

Data selama tiga semester menunjukkan bahwa implementasi inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS di Kota Lhokseumawe memberikan dampak positif, khususnya terhadap

peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada Semester II Tahun 2023, dari 61.066 anak yang masuk kategori wajib memiliki KIA, hanya 22.121 anak (36,2%) yang telah memilikinya. Persentase ini meningkat menjadi 38,9% pada Semester I Tahun 2024, dengan jumlah wajib KIA menurun menjadi 58.706 dan kepemilikan KIA meningkat menjadi 22.877. Pada Semester II Tahun 2024, jumlah wajib KIA naik kembali menjadi 60.606, dengan kepemilikan meningkat signifikan menjadi 25.137 anak (41,5%). Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dan progresif, yang mencerminkan bahwa inovasi pelayanan terintegrasi mulai efektif menjangkau lebih banyak masyarakat. Tren serupa terlihat dalam data kepemilikan Kartu Keluarga (KK), yang menunjukkan peningkatan konsisten dari 57.755 pada Semester II Tahun 2023 menjadi 58.224 pada Semester I Tahun 2024, dan kembali naik menjadi 58.908 pada Semester II Tahun 2024. Kenaikan ini menandakan bahwa prosedur perubahan susunan keluarga akibat kelahiran anak melalui skema inovasi ini berjalan cukup lancar dan diterima oleh masyarakat.

Namun demikian, data penerbitan akta kelahiran justru menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan cukup signifikan pada Semester I Tahun 2024 sebelum kembali meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun inovasi telah memberikan efisiensi dalam beberapa aspek, implementasinya belum merata pada seluruh jenis dokumen kependudukan. Kendala seperti ketidaklengkapan persyaratan, gangguan jaringan sistem, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur layanan masih menjadi faktor penghambat, terutama pada penerbitan akta kelahiran. Dengan demikian, meskipun PEKAD 3 IN 1 PLUS terbukti memberikan kemajuan dalam kepemilikan KIA dan KK, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan di lapangan. Aspek teknis, sosialisasi, dan edukasi publik perlu diperkuat agar ketiga jenis dokumen yang menjadi sasaran program Akta Kelahiran, KK, dan KIA dapat diterbitkan secara optimal dan merata.

3.2 Diskusi Temuan Utama

Penelitian Pada bagian ini, saya akan membandingkan temuan-temuan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai penerapan inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS dan tantangan yang dihadapi dalam proses difusinya. Perbandingan dengan Penelitian Isnawati (2017) Sama halnya dengan temuan penelitian Isnawati (2017) mengenai difusi program keluarga berencana, di mana dukungan dari tokoh masyarakat dan kader kesehatan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor komunikasi menjadi kunci keberhasilan dalam penyebaran inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian Isnawati yang lebih fokus pada komunikasi interpersonal, dalam penelitian ini sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan kerja sama dengan rumah sakit, yang memungkinkan inovasi ini dijangkau oleh masyarakat secara lebih luas.

Perbandingan dengan Penelitian Mardiyanti, R. I. (2019) Berbeda dengan temuan penelitian Mardiyanti (2019) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi melalui platform tradisional seperti Samsat *On The Spot* perlu ditingkatkan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi melalui platform digital seperti Instagram dan YouTube telah efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PEKAD 3 IN 1 PLUS. Meskipun

demikian, hambatan teknis seperti gangguan jaringan SIAK dan ketidaklengkapan dokumen dari masyarakat tetap menjadi tantangan yang sama.

Perbandingan dengan Penelitian Prasetyowati & Kismartini (2023) Temuan dalam penelitian ini memperkuat temuan Prasetyowati & Kismartini (2023) yang menyatakan bahwa hambatan teknis dalam penerapan inovasi, seperti keterbatasan teknologi dan kesalahan dalam penggunaan sistem, masih menjadi tantangan utama dalam difusi inovasi di sektor publik. Namun, inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS lebih berfokus pada integrasi layanan dalam satu proses, yang meminimalkan langkah-langkah birokratis dan memudahkan akses bagi masyarakat. Perbandingan dengan Penelitian Amalia (2024) Sama halnya dengan temuan Amalia (2024) yang menunjukkan bahwa adopsi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menghadapi tantangan terkait penerimaan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, temuan penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam penerimaan masyarakat terhadap sistem baru. Meskipun demikian, inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS berhasil mengatasi hambatan tersebut dengan mengurangi kompleksitas layanan, sehingga masyarakat lebih cepat beradaptasi meskipun tidak sepenuhnya memahami nama atau konsep inovasi ini. Perbandingan dengan Penelitian Prasetyowati et al. (2023) Penelitian ini menolak beberapa temuan dalam penelitian Prasetyowati et al. (2023) yang menunjukkan bahwa difusi inovasi PAKLAY Komplit terhambat oleh faktor budaya organisasi dan individu. Dalam konteks PEKAD 3 IN 1 PLUS, meskipun hambatan teknis tetap ada, masyarakat dan petugas Disdukcapil Kota Lhokseumawe lebih mudah beradaptasi dengan inovasi ini berkat adanya SOP yang jelas dan sistem kerja sama yang terstruktur dengan rumah sakit.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan dan menambah wawasan terkait penerimaan dan hambatan dalam difusi inovasi pelayanan publik, khususnya dalam konteks inovasi integrasi layanan kependudukan yang mengutamakan kemudahan dan efisiensi. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru mengenai keberhasilan sosialisasi melalui media digital dan kerja sama lintas sektor, yang menjadi faktor utama dalam mempercepat adopsi inovasi di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis menggunakan teori difusi inovasi Rogers (2003) serta teori hambatan difusi Ni'mawati & Zaqiah (2020), inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS yang diterapkan Disdukcapil Kota Lhokseumawe terbukti memberikan kontribusi positif dalam mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran, KK, dan KIA, melalui layanan terintegrasi berbasis kerja sama dengan rumah sakit. Inovasi ini memenuhi lima karakteristik inovasi Rogers, meskipun masih menghadapi hambatan psikologis, praktis, dan nilai. Disdukcapil merespons hambatan tersebut dengan memperkuat koordinasi lintas instansi, edukasi publik, program jemput bola, dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan strategi ini, inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS dinilai memiliki potensi keberlanjutan selama terus dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara menyeluruh. **Keterbatasan penelitian**, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam interpretasi hasil dan arah pengembangan studi selanjutnya. Pertama, data yang diperoleh sebagian besar bersumber dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Disdukcapil serta mitra terkait, sehingga perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan belum tergali secara menyeluruh. Hal ini membatasi pemahaman terhadap tingkat kepuasan, kendala

yang dihadapi pengguna, serta efektivitas inovasi dari sudut pandang penerima manfaat langsung. Kedua, keterbatasan waktu dan akses menyebabkan cakupan lokasi observasi hanya berfokus pada Kota Lhokseumawe, sehingga generalisasi temuan terhadap konteks daerah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, meskipun menggunakan teori difusi inovasi Rogers dan hambatan difusi menurut Ni'mawati & Zaqiah sebagai landasan analisis, penelitian ini belum menguji secara kuantitatif hubungan antara karakteristik inovasi dan tingkat adopsi di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang melibatkan pendekatan kuantitatif dan partisipasi masyarakat secara lebih luas untuk memperkuat validitas dan kedalaman analisis. **Arah masa depan penelitian**, Arah masa depan penelitian terkait inovasi PEKAD 3 IN 1 PLUS dapat difokuskan pada penguatan strategi implementasi berbasis komunitas, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas pendekatan sosialisasi melalui forum komunitas seperti majelis taklim, posyandu, dan kegiatan gampong dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Selain itu, pengembangan sistem digital terintegrasi yang mampu memfasilitasi verifikasi dan pelacakan dokumen secara real time menjadi area penting untuk diteliti, guna mendorong efisiensi dan transparansi layanan. Aspek lain yang relevan untuk dikaji adalah dampak pelatihan pegawai dan penguatan infrastruktur teknologi terhadap kinerja layanan, serta peran petugas penghubung di rumah sakit dan gampong dalam mempercepat proses administrasi. Penelitian juga perlu mengkaji mekanisme evaluasi berkala dan survei kepuasan masyarakat sebagai alat pengukuran yang dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dalam pengembangan layanan publik yang berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan secara khusus kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, serta Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atas waktu, arahan, dan informasi yang sangat berharga dalam mendukung kelancaran penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada petugas RS MMC, yang telah memberikan informasi yang relevan terkait implementasi inovasi pelayanan. Tidak lupa, saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat pengguna inovasi yang telah bersedia membagikan pengalaman dan pandangannya sebagai bagian penting dalam kajian ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada dosen pembimbing, para pengajar, dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi. Dukungan dari keluarga, rekan mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu juga sangat saya hargai, karena telah memberikan semangat dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, A., Wahidah, I., & Wibowo, M. T. H. (2022). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13572>
- Dewi Ramadhani, K. P., & Prakoso, C. T. (2025). Difusi inovasi aplikasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan*

- Ilmu Sosial*, 6(3), 1841–1851. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3.4348>
- Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan ketenagakerjaan.
- Isnawati, M. (2017). Difusi Inovasi Program Keluarga Berencana “Dua Anak Lebih Baik” dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. *Jurnal Online Kinestik*, 4(1), 115–128.
- Kuntarto, G. P., Isyahrani, S., & Gunawan, I. P. (2019). Performance of K-Means clustering algorithm in enriching a new concept of amenities into Dwipa Ontology III within the Indonesia tourism domain. In *2019 International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI)* (pp. 334–339). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISRITI48646.2019.9034563>
- Madjid, U. (2021). *Manajemen Sumber Daya Aparatur di Era Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Mardiyanti, R. I. (2019). Difusi Inovasi Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan “SAMSAT ON THE SPOT”) di Kantor Bersama SAMSAT Karangploso Kabupaten Malang. *Responsive*, 3(4), 179.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prasetyowati, S. A. A., Kismartini, K., & Hanani, R. (2023). Difusi Inovasi Paklay Komplit (Paket Layanan Komplit) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–20.
- Prasetyowati, S. A. A., & Kismartini. (2023). Difusi Inovasi PAKLAY Komplit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 15(1), 80-95.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th ed.)*. Free Press.
- Septiani, I. (2020). *Penerapan Teknologi dalam Pemerintahan: Studi Kasus di Indonesia*. Bandung: Penerbit Universitas.
- Setyowati, N., Masyhuri, Handoyo Mulyo, J., & Irham. (2024). Benefits, barriers, and levels of e-commerce adoption: Study of traditional beverage SMEs. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 10(3), 80–106. <https://doi.org/10.51599/are.2024.10.03.04>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Karman, K., Deswanto, R., & Ningsih, S. A. (2021). Implementasi E-Government pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 43–50. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1525>
- Nurdiansyah, D., Ma'ady, M. N. P., Sukmawaty, Y., Utomo, M. C. C., & Mutiani, T. (2024). Clustering analysis for grouping sub-districts in Bojonegoro district with the K-Means method with a variety of approaches. *Barekeng*, 18(2), 1095–1104. <https://doi.org/10.30598/barekengvol18iss2pp1095-1104>
- Wargadinata, E. L. (2021). Hubungan dan peran pemangku kepentingan program Smart-Kampung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 83–98. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWPB/article/view/1449>
- Wahid, F., & Iswari, L. (2007). Adopsi Teknologi Informasi Oleh Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, 75–79.
- Wance, M., Aslinda, Niswaty, R., Wahira, Nur, A. C., & Madubun, J. (2025). Trends in the publication of the effectiveness and impact of digitalization in population administration: A systematic review. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(1), 281–290. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200126>
- Verona, R., Ariyanti, S. N., Gidion, G., Bahari, Y., & Warneri, W. (2023). Penerapan Teori

Difusi Inovasi pada Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(6), 2569–2581.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.5870>.

